

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bukittinggi adalah kota kedua terbesar di Sumatera Barat. jumlah penduduk berjumlah sebanyak 121.028 jiwa. Kota Bukittinggi ini memiliki keunggulan komparatif karena terletak pada posisi silang dalam Provinsi Sumatera Barat sehingga sangat berpotensi untuk terus berkembang secara ekonomis, tujuan utama pariwisata dan perdagangan di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan.

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepala daerah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan.

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (yang mencakup anggaran dan barang diiringi dengan dana yang dikelola oleh bandara fungsional). Kota Bukittinggi memiliki 25 SKPD yang terdiri dari Asisten, Sekretariat, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pemilihan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian dikarenakan SKPD merupakan bagian pemerintah daerah yang melaksanakan atas fungsi dan bertanggung jawab atas pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

SKPD Kota Bukittinggi mempunyai peran dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan. Pada tahun 2021, Kota Bukittinggi memperoleh opini audit WTP dari BPK. Hal tersebut merupakan kali kedelapan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mendapat opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. (BPK, 2022)

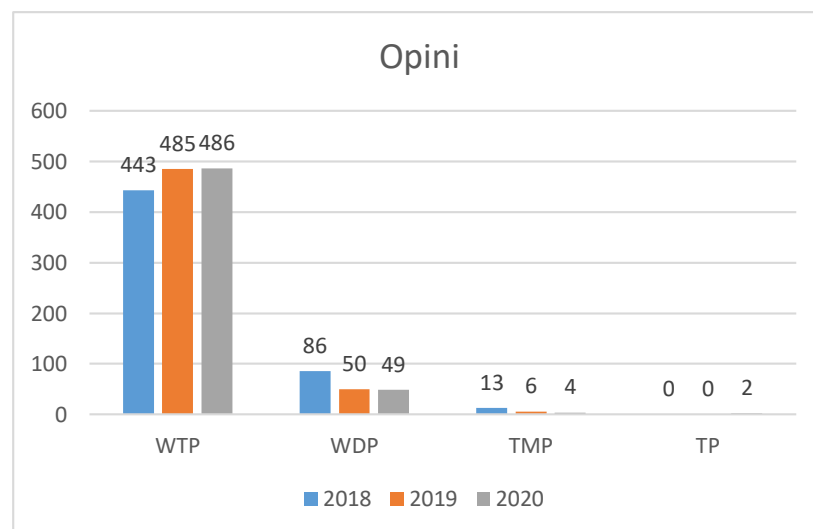
1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebuah kesesuaian dengan standar yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan syarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CALK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP), (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini yang menyatakan karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji pemeriksa, adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti pemeriksaan tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, (3) Tidak Wajar (TW) adalah opini yang menyatakan bahwa ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi salah saji yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan berpengaruh secara keseluruhan, (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat atau opini dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa

menyimpulkan bahwa terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian.

Berdasarkan Ikhtisaran Hasil Pemerintahan Semester I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2020. Terhadap 541 LKPD Tahun 2020 tersebut, BPK memberikan 486 opini WTP (90%), 49 opini WDP (9%), 4 opini TMP (0,7%), dan 2 opini TW (0,3%) seperti disajikan. Hasil opini tersebut telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya. Berikut disajikan perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dari tahun 2018 hingga 2020:



Gambar 1. 1

Perkembangan Opini Pemerintah Daerah Pada Tahun 2018-2020

Sumber: Data olah sendiri dan (RI, 2021)

Dilihat secara umum, opini pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan yang lebih baik, terdapat opini WTP yang meningkat dan opini yang lainnya menurun dari tahun sebelumnya. Tetapi, pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 terdapat opini yang tidak mencapai Wajib Tanpa Pengecualian karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, terdapat permasalahan mengenai Sistem Pengendalian Intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan beberapa LKPD tidak mendapatkan opini WTP.

Menurut Bapak Erman Safar selaku Walikota Bukittinggi mengungkapkan berdasarkan hasil Quality Assurance BPKP Pusat atas Penilaian Maturitas (Tingkat Kematangan) SPIP, Pemko Bukittinggi berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 6 tingkat Maturitas SPIP, dengan beberapa catatan dan kondisi SPIP tersebut belum bagus. “Menyikapi catatan yang diberikan terhadap penyelenggaraan SPIP tersebut, selama kurun waktu tahun 2017 sampai sekarang, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bukittinggi perlu adanya perbaikan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern untuk kedepannya. (Kominfo, 2021)

Permasalahan tentang kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyak kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pengawasan Keuangan).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. BPK menemukan tiga kelemahan pengendalian intern dan tiga permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2020 permasalahan tersebut antara lain terkait dengan penatausahaan persediaan belum memadai, penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai, pengelolaan pendapatan dan belanja belum memadai. Badan

Pemeriksaan Keuangan juga menemukan tiga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan yaitu tidak melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak. Hal ini yang menyebabkan kualitas laporan keuangan dari pemerintah tersebut masih banyak kekurangan sehingga perlu ditelusuri apa saja faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksanaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah, 2020) Sistem Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya menurut. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Bandung mempunyai arti bahwa semakin baik sistem pengendalian intern dilaksanakan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. (Lestari, 2020)

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemahaman Akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Hanggara, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana seseorang mengerti dan paham betul akan akuntansi sebagai proses dimulai dari proses transaksi dan melakukan pencatatan sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2017) menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya Wulan (2020) menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, sedangkan menurut (Intania, 2019) menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut jadi teori yang tidak konsisten pada Pemahaman Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. (Steinbart, 2018)

Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk pengguna

mengambil keputusan baik pengguna *internal* maupun *eksternal*.

Menurut Steinbart (2018) menyatakan fungsi Sistem Informasi Akuntansi yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi

Penelitian yang dilakukan oleh Menurut Harun (2021) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan menurut (Eo Kutu Goo, 2021) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu tidak adanya konsistensi secara teori mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan Keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kualitas laporannya kepada pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Sehingga dalam menyajikan laporan keuangan tidak ada kesalahan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,

Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sangat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan.

Fenomena yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat TA 2020, Badan Perwakilan Keuangan Sumatera Barat menemukan tiga kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan tiga ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem Informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 ?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022?
 - b. Pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022?
 - c. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada

SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022.

3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial:
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022
 - b. Pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022.
 - c. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bukittinggi tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga peneliti selanjutnya baik secara Aspek teoritis maupun Aspek praktis, seperti berikut ini

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta referensi bagi para penelitian selanjutnya mengenai akuntansi pemerintahan dan Laporan keuangan pemerintah Daerah

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan menjadi bahan perbaikan pada laporan keuangan pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian ini. Isi bab ini meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan .

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif). Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data. Kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya dengan penelitian – penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.